

ILMU dan BUDAYA

SUSUNAN REDAKSI JURNAL ILMU DAN BUDAYA

Pemimpin Umum	: Rektor Universitas Nasional
Wakil Pemimpin Umum	: Dr. Eko Sugiyanto., M.Si
Mitra Bestari	: Prof. Dr. Syamsuddin Harris, APU Prof. Drs. Umar Basalim, DES Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., MH. Prof. Dr. Ir. Budi Santoso., M.Sc., APU Dr. Sigit Rochadi., M.Si Dr. Rusman Ghazali., M.Si Kumba Digdowiseiso, M.App.Ec.
Pemimpin Redaksi	: Drs. Harun Umar., M.Si
Redaksi Pelaksana	: Drs. Syarif Nur Bienardi., MM.
Redaktur	: Drs. H.A.Soebekti Abdulwahab, Ak., MM. Drs. Hari Zamharir., M.Si Drs. Fathuddin, SIP., M.Sas.
Pemimpin Usaha	: Drs. Didit Setiabudi, M.Si
Sekretaris Redaksi	: Asngadi S, SH
Alamat Redaksi	: Kampus Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu. Jakarta Selatan, 12520. Telpon : 021-78837310/021-7806700 (hunting) ext : 172. Fak : 021-7802718. email : bee_bers@yahoo.com

Redaksi menerima tulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan akademis yang baku dan berhak memperbaiki bahasa maupun teknis penulisan tanpa mengubah maknanya.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH UNTUK JURNAL ILMU DAN BUDAYA

1. Naskah asli dan belum pernah dipublikasikan
2. Naskah adalah hasil penelitian dan studi kepustakaan yang obyektif, sistematis, analitis dan deskriptif
3. Naskah diketik rapi dengan huruf Time New Roman, 12 pt, berukuran 1,5 spasi, kertas kwarto sepanjang 15-25 halaman, diserahkan berupa print-out dan disimpan dalam disket atau flasdisk, sudah termasuk tabel dan gambar yang disimpan pada folder tersendiri
4. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris
5. Judul naskah singkat sesuai dengan isi. Abstraksi beserta kata kunci menggunakan Bahasa Inggris untuk naskah Bahasa Indonesia, dan sebaliknya.
6. Naskah yang berisi lontaran atau pemikiran harus berisi bab-bab; (1) Pendahuluan, (2) Bagian Isi, (3) Kesimpulan, Daftar Pustaka. Catatan Kaki dalam bentuk Body-Note.
7. Naskah yang berisi laporan penelitian ditulis dengan rincian ; (1) Pendahuluan, (2) Rumusan Masalah, (3) Metodologi Penelitian, (4) Hasil Temuan, (5) Simpulan, (6) Daftar Pustaka. Catatan Kaki dalam bentuk Body-Note.
8. Pengiriman naskah disertai biodata penulis, alamat dan email
9. Naskah yang tidak layak terbit di Jurnal Ilmu dan Budaya tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis dengan menyerahkan perangko secukupnya.
10. Naskah yang telah dimuat Jurnal Ilmu dan Budaya dilarang dipublikasikan pada majalah atau Jurnal lain tanpa seizin redaksi
11. Naskah dikirimkan ke redaksi Jurnal Ilmu dan Budaya, Kampus Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu. Jakarta Selatan, 12520. Telpon : 021-78837310/021-7806700 (hunting) ext : 172, Fak : 021-7802718.
Email : bee_bers@yahoo.com
12. Keterangan lengkap dapat menghubungi Redaksi Jurnal Ilmu dan Budaya.

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Jurnal Ilmu dan Budaya pada Edisi Februari 2015 memuat tulisan dengan tema : Energi, Ekonomi, Biologi, Komunikasi, Internasional, Budaya dan Sastra Inggris.

Keanekaragaman tulisan dalam Jurnal Ilmu dan Budaya adalah ujud dari luasnya ilmu dan sains sebagai dasar peradaban pengetahuan yang memiliki cirri-ciri berfikir yang harus menghargai seluruh studi-studi ilmiah ujud dari kegiatan akademik.

Semangat untuk terus meneliti dan menghasilkan tulisan ilmiah yang anti plagiasi adalah roh dari pendidikan yang bermoral, yang masih kurang dalam masyarakat kita; oleh karena itu Redaksi akan segera berterima kasih jika para pembaca sudi mengirimkan hasil penelitian atau kajian untuk menambah cakrawala keilmuan kita semua.

Harapan kami edisi awal tahun 2015 ini, menjadi awal dari peningkatan mutu Jurnal Ilmu dan Budaya, tentu dengan berbagai masukan dari para pembaca.

Terima kasih.

Jakarta, Februari 2015

Redaksi

DAFTAR ISI

No.	Hal
I. Kata Pengantar	iii
II. Prospek Masa Depan Dunia Internasional, Politik dan Teknologi, Dilihat dari Aspek Energi Budi Santoso	5099
III. An Annotated Translation Of A Novel Entitled : Remarkable Creatures I Nyoman Adnyana	5113
IV. Perlakuan Akuntansi Terhadap Fixed Asset Yang Dijaminkan Khairul Saleh L Tobing	5139
V. Aplikasi Daring PB-210 Untuk Estimasi Laju Sedimentasi Muara Cigede dan Ciomas Pada Daerah Tangkapan Waduk Malahayu - Brebes Tommy Hutabarat	5149
VI. Analisis Rubrik Pendapat Dalam Surat Kabar Tempo : Kerangka Framing William A, Gamson dan Adre Modigliani. Djudjur Luciana Radjagukguk	5165
VII. ALBA Sebagai Kebijakan Regional Containmentpolicy Neoliberal Dikawasan Amerika Latin Harun Umar dan Rahmat Sufajar	5185
VIII. Artis dan Kegiatan Politik : Studi Keterlibatan Artis Pada Pemilu Legislatif 2014 Sahrudin Lubis	5209
IX. Etnoritual Masyarakat Tengger di Bromo Tengger Semeru Jawa Timur Jati Batoro	5227

**ARTIS DAN KEGIATAN POLITIK :
STUDI KETERLIBATAN ARTIS PADA PEMILU
LEGISLATIF 2014**

Sahrudin Lubis¹

Abstract

This study investigates how the artist's involvement in the legislative elections of 2014. The involvement of artists in politics is not a new, if we look at the countries that established democracies like the United States, the artist's involvement in politics either as a supporter (endorser) as well as the candidate long-standing, such as President Ronald Reagan before the artist, Arnold Schwarzeneger also went on to become governor of California. Two artists chosen for two periods of leadership. Then Barack Obama also given celebrity status was elected for the second time. Indonesia's involvement in political life artist from year to year becomes increasingly, both in local elections and legislative elections. In the 2009 legislative elections by 18 artists selected as a member of the legislature and the lack of performance and achievement amid artist who became an Member of Parliament in 2009, this did not dampen the artist to re-run for the legislative elections. Then the legislative elections in 2014 gave birth to 18 selected artists, finding which emerges is that the artists who put up many who seek political fortunes with an ulterior motive in the power struggle in parliament. The party does not have a recruitment system based on meritocracy that allows the best people with the capacity, experience a more adequate nominated. Many artists are selected through the 2014 elections with minimal track record in politics, and was elected only with the most popularity as an artist.

Keywords: Artis, politik, Pemilu Legislatif

A. Pendahuluan

Keterlibatan artis dalam politik bukanlah hal baru, di Negara- Negara yang lebih mapan dalam demokrasi, keterlibatan tersebut tidak saja sebagai

¹ sahrudin.lbs@gmail.com

pendukung (*endorser*) tetapi menjadi kandidat (*candidate*) dan telah banyak berhasil menduduki jabatan-jabatan politik. Ronald Reagan sebelum menjadi presiden AS ke 40, dirinya dikenal sebagai seorang aktor. Menurut Tetapi jauh sebelum itu Presiden Kennedy sudah menjadi pusat dari perkembangan evolusi kampanye presiden, walaupun jauh sebelum itu Theodore Roosevelt dan Franklin D. Roosevelt telah mengambil keuntungan dari *celebrity instrument* dalam kampanye mereka (Morini, 2011).

Ronald Reagan merupakan Presiden Amerika yang selalu dihubungkan ketika berbicara dan membahas keterlibatan dan pencalonan artis dalam dunia politik. Terpilihnya Reagan memang tidak terlepas dari popularitas yang dimilikinya dalam dunia keartisan. Pertama kali menggeluti dunia Film sejak tahun 1937 dan kemudian membintangi lebih dari 50 film sebelum pencalonannya sebagai presiden. Sebelum presiden terpilih, Reagan mengawali karir di dunia politik sebagai anggota partai Demokrat. Dia memiliki konsentrasi pada isu antinuklir. Selain mengandalkan popularitasnya, Reagan juga membangun jejaring politik dalam jangka waktu relatif lama (Hasbi, 2013).

Aktor film terminator, Arnold Schwarzeneger menjabat Gubernur California mulai 2003 hingga 2011. Aktor film ini sebelumnya sudah lama bergabung dengan Partai Republik dan menjadi kendaraan politiknya saat menjadi calon Gubernur California. Arnold memang berbeda dengan politisi lain dalam penggunaan media dalam kampanye politiknya. Dia membuat penggunaan media outlet tradisional dan juga lebih memilih berbicara dengan Larry King Jay Leno, dan Sean Hannity dari pada Los Angeles Times, Wall Street Journal (Steven J. Ross, 2011). Artis lain yang terkenal adalah Joseph Estrada yang memiliki pengalaman politik yang panjang sebelum terpilih menjadi presiden, dia telah berkarir sebagai walikota dan senator.

Penelitian akan *celebrity endorsement* dalam isu-isu politik mulai pada tahun 1970an Dimana kajian awal terkait dengan keterlibatan artis bermula dari penjualan produk-produk dalam dunia marketing. (Atkin & Block, 1983). Keterlibatan artis dalam dunia politik Indonesia bukanlah hal baru, semasa orde baru artis menjadi *endorser* dalam setiap kampanye partai politik, semua partai politik menarik artis untuk menarik minat masyarakat memilih partai tersebut, ada yang ketika kampanye menjadikan artis sebagai penyanyi dan orasi, dan ada juga yang menjadi calon legislatif. Dukungan artis dan calon dari artis berlanjut sampai sekarang baik dalam pemilu presiden, kepala daerah dan juga pemilu legislatif. Bahkan dimasa era

reformasi kesempatan artis untuk menjadi endorser dan kandidat semakin terbuka lebar.

Celebrity endorsement telah lama diterapkan dalam dunia marketing sebelum massif dipakai dalam dunia politik seperti kampanye politik, pencalonan celebrity dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif (Mingqian Li, 2011). *Celebrity endorsement* yang paling umum di pakai adalah di Amerika Serikat, terkait dengan urusan produk barang, brand, organisasi dan figure politik (Brett Martin, 2010). Seperti menurut penelitian bahwa oprah's endorsement telah meningkatkan sebanyak 1,015,559 pemilih untuk obama sehingga dia bisa mengalahkan Hilliary Clinton pada saat *primary election*, (Jennifer Brubaker, 2011)¹ dan menurut perkiraan (Garthwaite & Moore, 2008) endorsement oprah juga telah meningkatkan angka pemilih pada pemilihan Amerika Serikat sebanyak 2,196,476, hal ini memungkinkan karena pengaruh dari *celebrity*.

Pengalaman beberapa artis dunia yang terpilih dalam kontestasi politik ternyata tidak semata-mata mengandalkan dunia keartisan yang memberikan modal popularitas yang memberikan jalan lebih mudah untuk mendapatkan elektabilitas yang lebih tinggi, karena dengan modal popularitas selangkah lebih maju dan punya "modal awal" yang lebih dibanding dengan kandidat lain. Tetapi mestinya seorang artis tidak serta merta hanya bermodalkan popularitas dalam dunia keartisan tetapi juga punya modal pendidikan, keahlian dan pengalaman dalam dunia politik. Hal ini yang dilakukan oleh Reagan, Arnol, Estrada yang terlebih dahulu terlibat dalam dunia politik sebelum penominasian mereka dalam jabatan politik. Sehingga mereka sudah memiliki pengalaman, kematangan dan proses internalisasi dalam partai politik mereka, sehingga ketika terpilih diharapkan bisa bekerja dalam memperjuangkan kehendak publik, yang tentunya berbeda dengan dunia keartis dan yang sifatnya berupa sandiwara hidup.

Apabila kita melihat keterlibatan dan masuknya artis Indonesia kedalam dunia politik, tidak banyak yang punya latar belakang politik yang mumpuni. Kemunculan mereka menjelang pemilu seolah-olah sebagai "penjudi" yang mencari keberuntungan "kue" kekuasaan, walaupun banyak yang mengkemas seolah-olah keterlibatan mereka dalam dunia politik untuk pengabdian dan memperjuangkan kepentingan publik, walaupun dalam kenyataan, beberapa artis yang terpilih tidak kelihatan kinerja yang nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, malah artis ada anggota legislatif yang sibuk main sinetron dan masuk acara TV yang tidak memiliki

hubungan dengan kerjanya sebagai anggota DPR. Banyaknya artis yang dicalonkan di pemilu 2014 menunjukkan bahwa memang tidak ada jenjang karir yang jelas yang perlu dimiliki seseorang untuk menjadi pejabat politik maupun anggota parlemen. Artis direkrut oleh partai politik seolah-olah hanya alasan popularitas, disamping mereka juga biasanya memiliki kemampuan keuangan yang cukup baik untuk mendanai kampanye (Hasbi, 2013).

Kondisi partai politik Indonesia yang tidak pernah berbenah dalam hal mencetak kader-kader yang mempunyai kualitas tinggi, bisa bekerja, berintegritas dan mekanisme internal partai yang belum terlembagakan, memungkinkan terjadinya rekrutmen artis sebagai langkah *instant* untuk mendulang suara pada pemilu, disamping sebagai upaya partai untuk bisa mendapatkan suara melampaui *Parliamentary Threshold*, tetapi juga untuk menciptakan biaya kampanye yang lebih murah.

Memasuki era reformasi keberadaan partai politik mendapat angin segar, sehingga partai politik tumbuh begitu cepat, sehingga hampir setiap orang merasa bisa dan mendirikan partai politik baru. Di awal-awal reformasi partai politik baru muncul lebih dari 100 partai politik. Demokrasi kontemporer menjadi sarana bagi masyarakat untuk bisa mengendalikan institusi-institusi politik (Pamungkas, 2011). Kemudahan untuk mendirikan partai politik tidak didapatkan di zaman orde baru, adanya pembatasan yang ketat membuat ruang manuver untuk mendirikan partai politik sangat tidak mungkin. Dengan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat untuk membentuk partai politik dan proses pencalonan dalam kontestasi politik, semua orang serasa ingin mencalonkan diri jadi anggota legislatif, orang yang tidak pernah terlibat dalam dunia politik, merasa “tergiur” untuk mencari dan “mendulang” keberuntungan tersebut, apalagi partai tidak memberikan kriteria yang ketat akan calon-calon yang akan dinominasikan, sehingga muncul calon calon yang bersal dari akademisi, pengusaha, kiai, pendeta, preman, wartawan hingga artis. Pada Pemilu 2014, jumlah mereka semakin banyak (Hasbi, 2013).

Melalui pemilu legislatif 2009, ada 18 artis yang terpilih menjadi anggota legislatif. Dari 18 artis yang terpilih, tidak semua bisa dilihat memiliki kinerja langsung, bahkan publik mempertanyakan kinerja mereka selama menjadi anggota DPR, bahkan sebagian mencemooh karena diantara mereka ada yang terlibat dalam korupsi dan juga tidak jarang artis yang

dilegislatif seolah-olah hanya pemanis di DPR dan tidak bisa melupakan cara, sikap ketika mereka masih menjadi artis.

Rendahnya kinerja dan bukti nyata kinerja artis sebagai anggota legislatif hasil pemilu legislatif 2009, ternyata tidak menyurutkan artis untuk kembali mencalonkan diri pada pemilu legislatif 2014. Sejumlah artis menjadi calon legislatif pada partai-partai politik peserta pemilu 2014. Nama-nama tersebut adalah nama yang tidak asing muncul di televisi, baik yang masih sering ataupun merupakan artis senior yang sudah jarang muncul di televisi.

Munculnya ketidakpercayaan partai politik, rendahnya kualitas kandidat dan orang-orang yang bekecimpung dalam politik, tidak jelasnya visi, misi dan program dari partai politik. Kondisi ini membuat partai politik sadar untuk melakukan terobosan demi untuk meningkatkan elektabilitas partai dan peningkatan kursi partai politik. Pada saat yang bersamaan munculnya apatisisme politik dari masyarakat akan calon-calon yang diajukan oleh partai politik dan ketidakpercayaan akan program-program yang diajukan oleh partai politik mengingat program-program yang selama ini ditawarkan oleh partai politik tidak banyak yang menjadi kenyataan dan terrealisasi ketika mereka mendapatkan kursi dan duduk dalam kekuasaan. Penominasian calon legislatif dari artis merupakan strategi jitu dalam rangka untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2014. Jumlah artis yang terpilih pada pemilihan legislatif 2014 memiliki jumlah yang sama dengan 2009 sama dengan 2009, hanya kemudian pada pemilihan 2014 ada 3 orang artis terpilih untuk DPD, sementara pada pemilihan 2009, kedelapanbelas artis terpilih masuk dalam lembaga DPR RI.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data didapatkan melalui penelusuran data-data kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel dan sumber dari interne yang berhubungan dengan fokus penelitian.

C. Konsep Partai Politik dan Artis

Menurut Ramlan Surbakti (1992), fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi yang dimiliki oleh partai tersebut,

fungsi utama ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi yang lain, seperti fungsi rekrutment politik, karena untuk memenangkan “pertarungan politik” maka partai politik harus menominasikan calon-calon yang dianggap lebih mudah untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Partai kerap mengambil langkah instansi dalam penominasian dan mengabaikan pengkaderan internal partai, tidak ada masalah apakah orang tersebut artis, pengusaha, aktifis dan masyarakat lainnya, tetapi mereka semua harus melalui proses rekrutmen yang didasarkan pada aturan main yang memungkinkan calon yang direkrut mengerti tentang politik dan juga telah melalui proses kaderisasi.

Dalam fenomena ini partai politik memanfaatkan fungsinya sebagai tempat rekrutmen para selebritis yang ingin menggunakan haknya untuk ikut serta dalam dunia perpolitikan. Mekanisme yang terjadi dalam hal ini adalah partai politik mencari dan mengajak orang yang dinilai berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Maka akan memperluas partisipasi politik. Partai politik menarik dari golongan selebritis dan golongan muda untuk dididik menjadi kader untuk masa yang akan datang serta menjaga eksistensi partai politik tertentu. Munculnya pro kontra artis sebagai calon atau kandidat dalam pertarungan politik bukanlah sesuatu yang harus di hindari mengingat tidak semua artis memiliki kualitas yang buruk apabila kita lihat dari sisi yang pro dan tidak sedikit juga artis yang kemudian hanya memiliki “modal” tampang cantik, minim keterampilan dan pengalaman politik. Jadi kekuasaan seseorang dalam hal ini selebritis lebih berpeluang dalam memperoleh tahta kekuasaan yang lebih besar karena mereka memiliki popularitas serta didukung oleh budaya masyarakat kita yang menganut budaya pop (Fikri, 2012).

Dilihat dari sudut pandang hak azasi manusia, setiap orang berhak untuk memilih dan diipilih, di calonkan dan mencalonkan sebagai kandidat dalam kontestasi politik. Baik itu sebagai kepala daerah, legislatif maupun presiden. Kebebasan dalam memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara dan tidak ada pihak yang dapat membatasinya termasuk oleh negara (*non derogable rights*). Pemilihan umum telah memanggil kita seluruh rakyat menyambut gembira hak demokrasi konstitusional, tentu kita berharap dari setiap proses pemilihan umum yang jujur, adil dan rahasia memunculkan sosok pemimpin yang berintegritas tinggi dan berkompeten (Darwis, 2013).

Dalam hal ini, keterlibatan artis dalam kancah perpolitikan tentu saja tidak menyalahi aturan karena hak asasi manusia telah tercantum dalam

Undang-Undang Dasar 1945 dan termuat dalam beberapa pasal terutama pasal 27-31. Maka hak asasi manusia meliputi hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan beragama, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kebebasan berserikat, hak atas pendidikan. Kemerdekaan hak perorangan dalam mencalonkan diri untuk pembangunan masyarakat telah tercantum dalam UUD'45 Pasal 28 yang menyebutkan "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", kemudian pada Pasal 28C disebutkan pula (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia menjunjung tinggi hak warga negaranya dalam berpolitik (Fikri, 2012).

Salah satu *instrument* suatu Negara dikatakan sebagai Negara demokrasi adalah keberadaan partai politik dalam sistem politiknya, baik sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan prosedural demokrasi maupun untuk menuju substansial demokrasi. Partai politik menjadi jembatan aspirasi masyarakat untuk kemudian diartikulasi dan diagregasi dalam sistem politik Indonesia. Beberapa fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo (2008) adalah sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Keempat fungsi ini melekat pada partai politik dan menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh partai politik untuk menunjukkan existensi partai politik sebagai instrument demokrasi. Peranan partai politik sangatlah penting dalam sistem politik demokratis, partai politik menjadi penghubung dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Maraknya anggota DPR yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi tidak membuat partai politik untuk memperbaiki rekrutment partai politik. Buruknya proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai politik dan kegagalan partai politik dalam melaksanakan kaderisasi anggota dengan baik, misalnya rekrutmen bakal calon legislatif yang hanya melihat dari sisi elektabilitas dan popularitas sang calon belaka (*vote getter*), padahal calon pemimpin haruslah yang berintegritas dan kompeten. Oleh karena itu tidaklah

heran ketika saat ini, kita melihat sebagian besar pemimpin negeri ini, banyak yang tidak berintegritas serta tidak kompeten (Darwis, 2013).

Dalam tulisan ini akan dipakai beberapa istilah yang memiliki arti kurang lebih sama, kadang memakai artis, celebrity, celebritas. Dalam tulisan ini tidak membedakan makna dari beberapa istilah tersebut, walaupun dalam kajian yang lebih dalam memungkinkan perbedaan di antara istilah tersebut. Batasan definisi *celebrity* disampaikan oleh Graeme Turner yang memberikan definisi sesuai dengan kondisi masa kini sebagai berikut:

“... mereka biasanya berasal dari industri olahraga dan hiburan, mereka sangat mudah ditemukan/tampak pada media, dan kehidupan pribadi mereka akan menarik perhatian publik ketimbang kehidupan profesional mereka (Gintings, 2008).”

Kehadiran media menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan artis untuk memberi makna yang lebih daripada sekedar diri sebagai orang biasa (profesi diluar artis), apabila kehidupan artis tidak di cover oleh media, maka hanya kehidupan profesional mereka yang kemudian muncul di media. Hal ini ditegaskan oleh David Marshal dalam David Turner, 2004 (Gintings, 2008) . Tetapi apabila kita melihat kehidupan artis dan persinggungannya dengan partai politik dalam beberapa tahun belakangan, terutama dalam masa pencagena untuk pemilu legislatif. Maka partai politik tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Mengingat banyak diantara para artis yang di calonkan yang memiliki : daya jual: yang sudah tidak ” tinggi” lagi di dalam ranah media, baik media cetak maupun elektronik, terutama televisi, yang dalam konteks keartisan Indonesia. Frekuensi kemunculan di media televisi merupakan indikator terkenal dan tidak terkenalnya seorang artis, walaupun dalam beberapa tahun belakangan ini kemunculan ini tidak selalu dimakanai dengan prestasi akting, profesionalitas dalam batasan yang terukur, karena sering kita temui kehidupan artis yang di blow up hanya berupa “ kekonyolan” bukan sesuatu yang positif. Bahkan sering kali diantara artis menciptakan sensasi yang negatif untuk kemudian memunculkan lagi namanya yang tenggelam, atau membuat skenario tertentu, seperti kawin dengan artis tertentu, kontroversi dalam kasus tertentu, sehingga ada kesempatan media untuk mengekspos kehidupan mereka. Walaupun kadang kehidupan itu adalah sesuai yang sifatnya aib.

D. Kontestasi Artis Dalam Pemilu Legislatif 2014

Partai politik pada dasarnya dibentuk untuk menjadi kendaraan politik yang sah bagi kader-kader untuk mengisi jabatan-jabatan publik tertentu. Namun demikian partai politik hanya boleh terlibat aktif dalam pengisian jabatan-jabatan publik yang bersifat politik dan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (*political appointment*), misalnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD), pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tapi tidak semua dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, misalnya dalam penyusunan kabinet untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, partai politik mengirimkan nama-nama kadernya untuk menduduki posisi Menteri diberbagai Kementerian Negara.

Partai politik harus mendapatkan minimal 3,5 persen kursi di legislatif pusat untuk bisa menduduk anggota terpilihnya di parlemen, apabila kurang dari 3.5 persen yang disebut dengan *parliamentary Threshold* (PT) maka partai politik tidak bisa mengisi kursi legislatif pusat (DPR RI), sehingga partai harus berusaha keras untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin. Ketentuan PT hanya berlaku untuk legislatif pusat sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 52/PUU-X/2012, ketentuan *parliamentary threshold* sebesar 3,5 persen tidak berlaku secara nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR RI, DPD, dan DPRD Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 208 karena dianggap ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) yang mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas sehingga bertentangan pula dengan tujuan pemilihan umum, yaitu memilih wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam amar putusan MK, untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, ambang batas perolehan suara 3,5% tidak berlaku. *Parliamentary threshold* hanya berlaku untuk DPR saja.

Demi untuk memenuhi ketentuan PT, maka partai politik berusaha keras untuk merekrut calon-calon yang punya modal besar, karena dalam rangka mengikuti pemilu membutuhkan biaya yang besar, disamping itu partai politik juga merekrut calon-calon populer demi untuk menciptakan

vote getter yang tinggi. Menurut Rein, Kottler dan Stoller, celebrity merujuk pada seseorang yang mempunyai nama, *interest riveting* dan *profifty generating value* (Rindova, Pollock, Hayward, 2006). Oleh karena itu pendefinisian *celebrity* yang seperti hal tersebut memberikan konsekuensi. Oleh karena itu penulis ini mendefinisikan selebriti dalam hal konsekuensinya untuk penonton dan individu selebriti, masing-masing, dan menyarankan bahwa nilai ekonomi selebriti berasal dari perhatian publik tinggi dan bunga yang dihasilkannya. Oleh karena itu, salah satu ciri khas selebriti adalah bahwa aktor sosial yang menarik perhatian publik: semakin besar jumlah orang yang tahu dan memperhatikan aktor, semakin besar tingkat dan nilai selebriti yang aktor. Karakteristik kedua mendefinisikan selebriti adalah bahwa aktor diperoleh respon emosional yang positif dari masyarakat. Respon ini timbul karena aktor memiliki nilai positif (Heider, 1946; Trope & Liberman, 2000) untuk penonton sampai-sampai ia membantu memenuhi berbagai tujuan perilaku, yang, dalam kasus selebriti, termasuk memenuhi kebutuhan audiens untuk gosip, fantasi, identifikasi, status, afiliasi, dan Adler & Adler, 1989; Gamson, 1994; O'Guinn, 2000). Dengan demikian, aktor yang menjadi selebriti memiliki arti-penting tinggi dan nilai emosional yang positif untuk pemirsa mereka, dan selebriti muncul dari perhatian penonton dan respon emosional positif terhadap aktor. Oleh karena itu, selebriti adalah properti dari hubungan aktor dengan penonton.

Dalam literature akademik keterlibatan artis dalam politik memakai istilah *Celebrity politics*. Ketenaran dan popularitas sangat mempengaruhi besar kecilnya suara yang akan diperoleh. Hal ini disebabkan oleh sistem pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia yang lebih mementingkan popularitas dibandingkan visi dan misi dari seorang calon kandidat. Diperparah lagi dengan minimnya peran serta masyarakat dan kurang pahamiannya mereka tentang calon kandidat, kemampuan dan pengalaman dibidang pembangunan masyarakat menjadi hal yang tidak penting bagi masyarakat umum. Kecenderungan para selebritis terjun dalam panggung perpolitikan menimbulkan selentingan bahwa para selebritis hanya ikut-ikutan karena melihat teman sejawatnya yang terjundalam panggung politik sukses dan menduduki jabatan terpenting (Fikri, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Payne et al., (2007), pelibatan artis dalam pemilihan Presiden Amerika meningkatkan angka pemilihan. Ahli sejarah melacak peran dari *celebrity* dalam pemilihan presiden adalah pada tahun 1920, pada saat itu kampanye Presiden Warden Harding yang mana

pada saat kampanye banyak di dukung oleh artis-artis bintang film (Mortman, 2004). Artis sinetron atau *public figure* dalam mensosialisasi partai politik tertentu dinilai sangat efektif. Hal ini merupakan strategi partai politik untuk mengeksistensikan partai. Dalam sosialisasi politik terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi partai, yaitu: kapital, popularitas tokoh, mesin partai politik dan marketing politik. Ada yang berpendapat bahwa perekrutan atris sebagai kader sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh partai politik. Tetapi pendapat lain bahwa artislah yang memanfaatkan partai politik untuk menjadikan sumber pendapatan baru bagi para selebritis (Fikri, 2012).

Sebagai artis Ronald Reagan bisa mengalahkan calon incumbent Presiden Jimmy Carter pada Pemilu November 1979, Reagan yang dianggap tidak memiliki kecakapan politik untuk menjadi pemimpin negara adidaya sebesar AS ternyata mampu menjadi Presiden AS dalam dua periode, dari 1980 sampai 1988 (Bhakti, 2010). Yang terakhir adalah obama yang merupakan politisi dengan status celebrity, kemunculan obama dipangung politik tidak hanya dilihat orang dari segi kemampuannya tetapi juga dari gaya berpakaian, berbicara dan disamping itu keberadaan istrinya yang kerap dibandingkan dengan celebrity papan atas amerika, sehingga status celebrity yang melekat pada obama juga mempengaruhi keterpilihan obama (Keller, 2010). Disamping itu juga dalam kontestasi pemilihan presiden di Amerika tahun 2004 dan 2008 telah melibatkan banyak artis sebagai endorser, celebrity menjadi symbol dalam pemilihan tersebut dalam menentukan pilihan masyarakat(Payne, at.all, 2007).

Menurut Frank Lindenfeld yang menjadi salah satu faktor orang mendorong untuk masuk berpartisipasi pada kontestasi politik adalah kepuasan financial.. Maka, dalam kehidupan berpolitik kemapanan ekonomi sangat perlu karena dengan adanya kemapanan ekonomi, jika tidak orang tersebut akan merasa apatis (Maran, 2007) Pada umumnya orang-orang yang berada di gedung parlemen termasuk para selebritis berasal dari kalangan atas ang mampu membiayai segala keperluan dalam perpolitikannya, meliputi dana kampanye.

Untuk memenangkan pemilu legislatif 2014 partai-partai melakukan banyak cara untuk dapat memenangkan pemilu tersebut. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh parpol-parpol tersebut, antara lain merekrut para praktisi, tokoh, akdemisi, termasuk artis, hal yang terakhir, artis menjadi jurus ampuh partai politik untuk menarik suara dari masyarakat. Ada beberapa kelebihan merekrut artis untuk pemenangan pemilu, diantaranya

adalah karena seorang artis telah mendapatkan nama di masyarakat. Hal inilah yang menjadi faktor popularitas, namun yang perlu diperhatikan adalah rekam jejak kandidat, sejauh mana dapat di pertanggungjawabkan sebagai wakil rakyat nantinya.

Hasil dari pemilihan legislatif 2009 yang melahirkan beberapa anggota legislatif dari artis, dalam perjalanannya sangat sedikit di antara para artis yang memberikan kontribusi yang nyata dalam menjalankan fungsi-fungsi legislatif, malahan beberapa diantara mereka masih menjalankan fungsi-fungsi dan peran keartisan. Malahan ada beberapa yang tersangkut masalah, dan ada yang memilih keluar dari anggota dan partai yang mengusungnya. Hal ini bisa saja terjadi karena kehidupan politik yang berbeda dengan kehidupan artis dan lakon yang mereka perankan ketika waktu main sinetron. Kenyataan yang berbeda antara kehidupan politik dengan kehidupan artis itu sendiri yang penuh dengan hura-hura dan kebebasan, sementara di politik harus menghadapi segala intrik dan rasionalitas tinggi. Yang perlu dibangun ke depan agar partai merekrut masyarakat untuk kadernya yang kualitas, sebab duduk di legislatif seseorang harus memiliki kreativitas, inovasi, dan mampu membuat rancangan konsep yang konstruktif. Karena hasil dari Rancangan konsep legislatif tersebut digunakan untuk mengatur negara, apabila negara aturannya tidak jelas, maka yang menjadi korban adalah masyarakat. Pemilu 2014 melahirkan anggota legislatif yang sama jumlahnya dengan pemilu legislatif 2009. Berikut ini artis yang terpilih pada pemilu legislatif 2014

Tabel 1
Artis yang terpilih menjadi anggota parlemen periode 2014-2019

No	Nama	Partai	Dapil	Suara Artis
1	Okky Asokawati	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II	35.727
2	Lucky Hakim	Partai Amanat Nasional (PAN)	Jawa Barat VI	57.891
3	Anang Hermansyah	Partai Amanat Nasional	Dapil Jawa Timur Jatim	53.559

		(PAN)	IV	
4	Desi Ratnasari	Partai Amanat Nasional (PAN)	Dapil Jawa Barat IV	56.397
5	Primus Yustisio	Partai Amanat Nasional (PAN)	Dapil Jabar V	45.485
6	Eko Hendro Purnomo	Partai Amanat Nasional (PAN)	Dapil Jatim VIII	69.301
7	Dede Yusuf Macan	Demokrat	Dapil Jabar II	142.939
8	Venna Melinda	Partai Demokrat	Jatim VI	49.383
9	Krisna Mukti	Partai Kebangkitan Bangsa	Dapil Jabar VII	31.987
10	Rachel Maryam Sayidina	Partai Gerindra	Dapil Jabar II	58.758
11	Moreno Suprpto	Partai Gerindra	Dapil Jatim V	52.921
12	Jamal Mirdad	Partai Gerindra	Dapil Jateng I	39.760
13	Rieke Diah Pitaloka	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	Dapil Jabar VII	255.044
14	Junico BP Siahaan	PDI Perjuangan	Dapil Jabar I	64.980
15	Tantowi Yahya	Partai Golkar	Dapil DKI III	45.507
16	Emilia Contesssa	caleg DPD	Dapil Jatim	1.660.542
17	Oni Suwarman	caleg DPD	Dapil Jabar	2.167.485
18	Maya Rumanthir	caleg DPD	Dapil Sualwesi Utara	206.496

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Di antara 18 artis yang terpilih sebagai anggota legislatif baik di DPR RI dan DPD RI ada delapan orang artis yang sebelumnya terpilih pada pemilu legislatif 2014. Ke delapan incumben artis ini sebagian besar berasal dari PAN. Perbedaan yang lain diantara 18 artis yang terpilih pada pemilu legislatif 2014 adalah bahwa untuk periode 2014-2019 terdapat 3 artis yang terpilih sebagai senator (anggota) DPD sebanyak 3 orang. Dimana apabila kita banding dengan periode sebelumnya ke 18 belas artis terpilih duduk di lembaga DPR RI. PAN yang “menurunkan” artis paling banyak mendapat suara paling kursi artis paling banyak pada pemilu 2014. Sementara partai demokrat yang pada periode 2009-2014 memiliki anggota legislatif paling banyak yaitu sejumlah 7 orang, pada pemilu 2014 partai ini hanya mendapatkan satu kursi yang berasal dari artis yaitu Venna Melinda, hal ini seiring menurunnya kursi dari partai secara keseluruhan, hal diakibatkan banyaknya anggota partai yang terlibat korupsi sehingga memperburuk citra partai dan akhirnya berakibat suara partai yang anjlok pada pemilu 2014.

Di antara para artis yang gagal masuk ke parlemen pada pemilihan 2014 adalah Angel Lelga, Destiara Talita, Ingrid Karsil, Nurul Arifin, Derry Drajat, Camel Petir, Arzeti Bilbina dan Venna Melinda. Angel Lelga Anggreyani merupakan salah satu artis yang banyak mendapat sorotan pada pemilu legislatif 2014. Elgel Lelga menjadi calon legislatif dari PPP pada daerah pemilihan Jawa Tengah V. Daerah Pemilihan tempat Angel Lelga mencalonkan meliputi Sukoharjo, Surakarta, Boyolali dan Klaten. Walaupun hanya “numpang” lahir dua pekan di Solo, bagi Angel Lelga Anggreyani wilayah ini sangat dekat di hatinya. Hal itu yang menyebabkan Angel untuk tidak ragu ‘bertarung’ di daerah pemilihan V Jawa Tengah yang dikenal sebagai ‘Dapil neraka’. Di Dapil itu Angel Lelga ‘bertarung’ dengan Puan Maharani yang menjadi calon legislator nomor urut 1 dari PDI Perjuangan. Di nomor urut 2, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini memasang Aria Bima. Dimana kedua calon ini merupakan termasuk calon andalan dari PDI P dan dapil ini memiliki sejarah panjang yang selalu dimenangkan oleh PDI P.

Artis lain yang tidak terpilih pada pemilihan legislatif 2014 adalah Nurul Arifin sebagai artis incumbent, dimana angka keterpilihannya pada pemilu 2009 menjadi artis kedua yang mendulang suara paling besar setelah Tantowi Yahya. Diantara anggota legislatif yang berasal dari artis Nurul Arifin dianggap banyak kalangan sebagai artis yang berprestasi, punya pengalaman,

memiliki track record yang baik, namun pada pemilihan 2014 dia tidak terpilih.

Rekrutmen artis dalam pemilu, merupakan salah satu jalan pintas demi untuk mendapatkan suara yang banyak. Hal ini kurang lebih sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh Dyre yang dikutip oleh Turner (2004) bahwa *celebrity* bisa dikategorikan sebagai “property” artinya menjadi aset finansial bagi pihak-pihak yang memanfaatkan mereka dalam konteks komersial demi untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini tentunya sesuai dengan kondisi politik Indonesia, yang diasumsikan sebagai anak kandung ekonomi politik yang diadopsi oleh partai politik untuk mendapatkan keuntungan dalam konteks kepopuleran para artis demi untuk keuntungan partai politik (Gintings, 2009).

Terkait kontestasi artis dalam pemilihan legislatif, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, Deddy Mulyana menilai kegagalan artis beken ini disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya kejenuhan masyarakat, politik uang dan persaingan ketat antar selebritis. Tidak adanya perubahan yang signifikan membuat masyarakat jenuh dengan calon-calon lama sehingga cenderung memilih muka baru. Politik uang juga menjadi salah satu faktor penting dalam kontestasi pemilu legislatif 2014, sehingga tidak jarang anggota legislatif yang berprestasi belum tentu terpilih dan dikalahkan oleh calon yang memiliki modal besar dan punya jaringan “preman”.

E. Simpulan

Keikutsertaan artis dalam politik merupakan bentuk partisipasi aktif dalam upaya untuk menduduki jabatan-jabatan politik baik dilegislatif maupun eksekutif. Dari segi dukungan, artis mengeruk dukungan terbanyak karena popularitas yang mereka miliki serta eksistensi partai politik yang menanungi mereka. Keterpilihan artis dalam politik tidak terlepas dari popularitas mereka dipanggung hiburan walaupun minim kapasitas dan pengalaman dalam politik. Proses rekrutmen partai politik yang tidak berbasis merit system membuat penominasian calon legislatif seolah hasil dari “pasar” keterbukaan yang berbasis pada keinginan hasil yang instan demi meraup suara partai yang besar. Pemberlakuan Parlemenary Threshold 3.5 persen menjadi ancaman buat partai sehingga partai melakukan cara-cara instan agar bisa melampaui batas tersebut sehingga partai bisa mengirimkan calonnya ke parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkin, C., & Block, M. (1983). "Effectiveness of celebrity endorsers. *Journal of Advertising Research*, 23(1), 57–61". Dalam David T. Morin, James D. Ivory, Meghan Tubbs, *Celebrity and politics: Effects of endorser credibility and sex on voter attitudes, perceptions, and behaviors*, *The Social Science Journal* 49 (2012) 413–420, *journal homepage: www.elsevier.com/locate/soscij*
- Bhakti, Ikrar Nusa, "Fenomena Artis dan Pilkada", tersedia pada: <http://aipi.wordpress.com/2010/04/27/fenomena-artis-dan-pilkada/>, Published April 27, 2010, Sumber: Seputar Indonesia, 27 April 2010, diakses pada 18 Januari 2014
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:PT Gramedia Pusadidaka Utama, 2008.
- Brubaker, Jennifer, "It doesn't affect my vote: Third-person effects of Celebrity Endorsements on College Voters in the 2004 and 2008 Presidential Elections", *American Communication Journal* 2011 SUMMER (Volume 13, Issue 2).
- Dewananta, Andy, "Artis dan politik", tersedia pada: http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10538&coid=3&coid=31&gid=2, sumber asli <http://www.waspada.co.id/Opini/Artikel/Artis-dan-politik.html> diakses pada 18 Januari 2014
- Gould, L. L. (2003). "The Modern American Presidency. Lawrence: University Press of Kansas", dalam Marco Morini, *The "Celebrity Obama" Strategy: The 2008 Presidential Campaign's Attack Ads*. *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 1 No. 12; September 2011
- Garthwaite, C., & Moore, T. J. (2008). "The Role of Celebrity Endorsements in Politics:

Oprah, Obama, and the 2008 Democratic Primary”, Jennifer Brubaker, “It doesn’t affect my vote: Third-person effects of Celebrity Endorsements on College Voters in the 2004 and 2008 Presidential Elections”, *American Communication Journal* 2011 SUMMER (Volume 13, Issue 2).

Gintings , Alfito Deanova, Selebrity mendadak Politisi, *Studi Pragmatisme Kaum Selebriti Dari Panggung Hiburan Menuju Panggung Politik*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.

Fikri, Luthfy Rijalul, “Fenomena Artis Di Kancan Politik Serta Pengaruhnya Terhadap Budaya Politik Indonesia”, Minggu, 09 Desember 2012, tersedia pada:
http://luthfyrijalulfikri.blogspot.com/2012/12/fenomena-artis-dikancan-politik-serta_9.html, diakses pada tanggal 18 Januari 2014

Hasbi, Sirajudin, “Artis Dan Karir Politik”, Tersedia Pada
[Http://Id.Berita.Yahoo.Com/Blogs/Newsroom-Blog/Artis-Dan-Karir-Politik-104503928.Html](http://Id.Berita.Yahoo.Com/Blogs/Newsroom-Blog/Artis-Dan-Karir-Politik-104503928.Html), Jum, 10 Mei 2013, Diakses Pada 18 Januari 2014

Howard, Mortman, ,“Those_GoldenMoments from Past Conventions,”MSNBC.com,Aug 28, 2004, accessed_online at:<http://www.msnbc.msn.com/id/5464091/>. dalam Craig Garthwaite,Tim Moore, *The Role of Celebrity Endorsements in Politics: Oprah, Obama, and the 2008 Democratic Primary* JEL_Classification_Numbers:D7; D72

Jemadu,Aleksius, *Perpolitikan Global dalam Teori dan Praktik*. Jogjakarta. 2008

Keller, 2010:121, “Celebrity diplomacy, spectacle and Barack Obama. *Celebrity Studies*” dalam Anita Cheung, *What Themes And Political Marketing Strategies Can Be Inferred From Barack Obama And Mitt Romney’s Facebook Images In The 2012 US Presidential Election Campaign?*, Skripsi Studi komunikasi pada University of Leeds May 2013

- Payne, J. G., Hanlon, J. P., & Tworney, D. P. (2007). "Celebrity spectacle influence on young voters in the 2004 presidential campaign". *American Behavioral Scientist*, 50, 1239-1246. Dalam Jennifer Brubaker, *it doesn't affect my vote: Third-person effects of Celebrity Endorsements on College Voters in the 2004 and 2008 Presidential Elections*, *American Communication Journal* 2011 SUMMER (Volume 13, Issue 2).
- Mingqian Li, "On Regulation of Celebrity Endorsement in China", www.ccsenet.org/jpl *Journal of Politics and Law* Vol. 4, No. 1; March 2011
- Pamungkas, Sigit, *Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute For Democracy and Walfarism, 2011.
- Rafel Raga Maran. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 2007.
- Rindova, Violina P., Timothy G. Pollock, Mathew L. A. Hayward, "Celebrity Firms: The Social Construction Of Market Popularity", *Academy Of Management Review* 2006, Vol. 31, No. 1, 50–71.
- Steven J. Ross, *Hollywood Left and Right: How Movie Stars Shaped American Politics*, Oxford University Press, 2011, Hal. 364
- Schickel, R. (1985), "Intimate Strangers: The Culture of Celebrity", dalam Ekant, Veer, Becirovic, Ilda, & Martin, Brett (2010), *If Kate Voted Conservative Would You? The Role Of Celebrity Endorsements In Political Party Advertising*. *European Journal of Marketing*, 44(3/4).
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasana Indonesia, 1992.